

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan
Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan
Bantuan Bencana

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penanggulangan Keadaan Bahaya

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1996 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana

Undang-Undang Nomor 23/PRP/1959 tentang Keadaan Bahaya

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 tentang Mobilisasi dan Demobilisasi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana

Buku

Alatas, S.H. (1978). *Korupsi, Sifat, Sebab dan Fungsi*. Jakarta: LP3ES.

Ali, Mahrus. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Arief, Barda Nawawi. (2001). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan
Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Chazawi, Adami. (2016). *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Raja
Grafindo Persada.

Dapartemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. (1995). *Kamus Besar Bahasa
Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Deliarnoor, dan Alamsah, Nandang & Sigid, Suseno. (2017). Modul 1 Pengertian
dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus.

Departemen Pendidikan Nasional. (2012). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta:
Pusat Bahasa (Edisi Keempat), Gramedia Pustaka Utama.

- Efritadewi, Ayu. (2020). *Modul Hukum Pidana*. Tanjungpinang: UMRAH Press.
- Erwin, Muhamad. (2012). *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ghufron Mukti, Ali dan Winarna, Aris. (2002). *Konstruksi Masyarakat Tangguh Bencana Kajian Integratif Ilmu, Agama dan Budaya*. Bandung: Mizan Pustaka.
- Hamzah, Andi. (1993). *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Hamzah, Andi. (2006). *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional Edisi Revisi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hartanti, Evi. (2005). *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika,
- Hoft, Ph Vissert. (2001). *Penemuan Hukum, judul asli Rechtsvinding*, diterjemahkan oleh B.Arief Sidharta. Bandung: Labolatorium Hukum FH Universitas Parahiayangan.
- Kodoatie, Robert J. dan Syarief, Roestam. (2006). *Pengelolaan Bencana Terpadu Banjir, Longsor, Kekeringan dan Tsunami*. Jakarta: Yarsif Watampone (Anggota IKAPI).
- KUHP terjemahan R. Soesilo. (1983). *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentar Lengkapnya Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea.
- M. Friedman, Lawrence. (1975). *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social Science Perspective)*. New York: Russel Sage Foundation.
- Mamudji, Sri. (2006). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mangestu, Yovita A, dan Tanya, Bernard L. (2014). *Moralitas Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Mardalis. (1995). *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Marwan, M. dan P, Jimmy. (2009). *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2009). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Mertokusumo, Sudikno. (2010). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Muladi dan Arief, Barda Nawawi. (2005). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Mulyadi, Lilik. (2007). *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis dan Masalahnya*. Bandung: Alumni.
- Nawawie, Barda. (2016). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Prenamedamedia Group.
- Prododikoro, Wirjono. (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Rangkuti, I dkk. (2021). *Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Rasjidi, Lili dan Putra, I.B Wyasa. (1993). *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Risdakarya.
- Reza, M. Zulfan. (2007). *Pemulihan Trauma: Panduan Praktis Pemulihan Trauma Akibat Bencana Alam*, Depok: Pusat Krisis Fakultas Psikologi UI, Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran Pendidikan Psikologi (LPSP3) Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.
- Santoso, Ibnu. (2011). *Memburu Tikus-Tikus Otonom*. Yogyakarta: Gava Media Cet.
- Sidharta, Arief. (2007). *Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Sihbudi, Riza dan Nurhasim, Moch. (2001). *Kerusuhan Sosial di Indonesia Studi Kasus Kupang, Mataram, dan Sambas*. Jakarta: Grasindo.
- Sihombing, Herman. (1966). *Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. (2013). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: FH UI.
- Solikin, H. Nur dan Anam, Nurul. (2015). *Pendidikan Anti Korupsi, Konep dan Aplikasi Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah & Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Pusataka Belajar.

- Subekti dan Tjitrosoedibjo. (2002). *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sudarsono. (2012). *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sumaryanto, Djoko. (2019). *Pengembalian Bebas Pembuktian TP dalam Rangka PKN*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Sunggono, Bambang. (2012). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Surayin. (2013). *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung: Yrama Widya.
- Tanya, Bernard L. dkk. (2013). *Teori Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Utrecht, E. (1958). *Hukum Pidana I*. Jakarta: Universitas Jakarta.
- Wijayanto dan Zachrie Ed, Ridwan. (2009). *Korupsi Mengorupsi Indonesia, Sebab Akibat dan Prospek Pemberantasan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Wiyono, R. (2005). *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Wojowasito, S. (1999). *Kamus Umum Belanda Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru.

Jurnal

- Ahmad, Taufik. (2022). *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal Muttaqien. Vol. 3, No. 1.
- Akmal, Diya UI dan Mada, Syafrijal Mughni. (2021). *Memaknai Hukuman Mati Bagi Koruptor Berdasarkan Filsafat Hukum*. Jurnal Ilmu Hukum Supremasi Hukum. Vol. 17, No. 02.
- Alatas, Sayed Husein. (2002). Dikutip dari Farid R. Faqih, mendulang Rente di Lingkar Istana. *Wacana Korupsi Sengketa antar Negara dan Modal*. Jurnal Ilmu Sosial Transformatif, Edisi 12.
- Anshari dan Fajrin, Muhammad. (2020). *Urgensi Ancaman Hukuman Pidana Mati Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Analisis Yuridis Normatif Terhadap Kebijakan Hukum Pidana/Penal Policy Sanksi Pidana Mati di Indonesia)*. Res Judicata. Vol. 3, No. 1.

- As'ad, Karmila dkk. (2021). *Eksistensi Pidana Mati Dalam Penegakan Hukum di Inodenia Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia*. Jurnal Of Lex Generalis. Vol. 2, No. 1.
- Askar, Muhammad Afdhal. (2019). *Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Sistem Hukum di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Syari'ah, Vol. 18, No. 1.
- Bunga, Marten. & et.al. (2019). *Urgensi Peran Serta Masyarakat dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Law Reform, Vol. 15, No. 1.
- Christian, Natalis dkk. (2022). *Analisis Kasus Fraud Korupsi Bantuan Sosial Covid-19*. Jurnal Akuntasnsi Dewantara. Vol. 6, No. 3.
- Daipon, Dahyul. (2021). *Hukuman Mati Bagi Koruptor Pada Saat Keadaan Tertentu (Pandemi Covid-19) Persepektif Hukum Nasional dan Hukum Islam*. Jurnal Kaijian Hukum Islam. Vol. 15, No. 1.
- Dewi, Ni Komang Ratih Kumala. (2020). *Keberadaan Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jurnal Komunitas Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha. Vol.6 No.1.
- Fitriani. (2014). *Analisis Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Ditinjau Dari Perspektif Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Yustisia. Vol. 90, No. 31.
- Hikmah dan Sopoyono, Eko. (2019). *Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol. 1, No. 1.
- Khairul Muqorobin, Mohammad dan Nawawi Arief, Barda. (2020). *Kebijakan Formulasi Pidana Mati dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Berdasarkan Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol. 2, No. 3.
- Manopo, Gabrielle Aldy dkk. (2023). *Analisis Pidana Mati Berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang*

- Hukum Pidana*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. Lex Administratum Vol. XIII, No. 1.
- Nugraha, Roy Satya. (2020). *Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Bantuan Sosial Covid-19 Menteri Juliari Batubara)*. Vol. 6, No. 2.
- Owen, Agave Frans. (2023). *Hukuman Mati Terhadap Terpidana Korupsi dalam Hukum Nasional Indonesia*. Unja Journal of LegalStudies. Vol. 01, No. 01.
- Putri, K. & Agustianto. (2021). *Efektifitas Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. e-journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha. Vol. 4, No. 3.
- R, Elsa. (2013). *Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Hukum PRIORIS. Vol. 3, No. 4.
- Rofii, M. Sya'roni. (2015). *Hukuman Mati Bagi Koruptor: Sebuah Diskurs Mendesak di Masa Kritis*. Istinbath Jurnal Hukum. Vol. 12, No. 1.
- Setiabudhi, I. & Artha, I. (2014). *Vonis Sanksi Pidana Tambahan Oleh Hakim Berupa Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Oleh Terpidana Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Denpasar*. Jurnal Magister Hukum Udayana. Vol. 6, No. 2.
- Sina, La. (2008). *Dampak dan Upaya Pemberantasan serta Pengawasan Korupsi di Indonesia*. Jurnal Hukum Pro Justitia. Vol. 26, No. 1.
- Surahmad. (2016). *Kontroversi Kebijakan Hukuman Mati Bagi Koruptor di Indonesia*. Pusdiknas: Jurnal Ilmiah Kebijakan Nasional dan Internasional. Vol. 2, No. 3.
- Syahputra, Guruh dkk. (2022). *Relevansi Hukuman Mati Bagi Pelaku Korupsi Dalam Negara Berstatus Darurat Covid-19 Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Acara Pidana*. Jurnal Ilmiah Metadata. Vol. 4, No. 1.
- Tantowi, Wildan. (2020). *Problematika Yuridis Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Koruptor Pada Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal Pascasarjana Hukum UNS. Vol. VIII, No. 2.

- Wardani, Koko Arianto dan Wahyuningsih, Sri Endah. (2019). *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Jurnal Hukum Khaira Ummah. Vol. 14, No. 3.
- Wiryanawan, P. & Tjatrayasa, M. (2016). *Analisis Hukum Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidananya*. Kertha Wicana: Journal Ilmu Hukum. Vol. 5, No. 2.
- Yanto, Oksidelfa. (2017). *Penjatuhan Pidana Mati Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Keadaan Tertentu*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 14, No. 1.
- Zubaidah, Titik dkk. (2021). *Krisis Ekonomi Bangsa Indonesia di Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal Syntax Fusion. Vol. 1, No. 2.

Website

- Wikipedia Bahasa Indonesia. (2023). *Korupsi*.
<https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi>. Diakses pada tanggal 26 Juni 2023.

